

Sistem, Problematika, dan Kebijakan Pendidikan di Turki

Ayu Muntoharroh

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

Email*: ayumuntoharroh67@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di Turki dalam perspektif perbandingan pendidikan, khususnya dari sudut pandang Pendidikan Agama Islam. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Turki sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem pendidikan yang unik karena dipengaruhi oleh dinamika sekularisme yang diintroduksi sejak era Mustafa Kemal Ataturk (1923) dan nilai-nilai keislaman yang tetap kuat di tengah masyarakat. Artikel ini menemukan bahwa sistem pendidikan Turki mencakup tiga jalur utama: pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan tinggi yang didukung program beasiswa Turkiye Burslari. Problematika yang dihadapi meliputi ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, polarisasi ideologi sekular-religius, tingginya persaingan masuk perguruan tinggi, tantangan pendidikan pengungsi, serta kesenjangan teknologi pendidikan. Kebijakan pendidikan Turki diwarnai oleh upaya penyeimbangan antara orientasi modern-sekular dan nilai Islam, termasuk revitalisasi sekolah Imam Hatip. Kajian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Problematika Pendidikan; Kebijakan Pendidikan Islam; Sistem Pendidikan Turki

Abstract

This article examines the educational system, problems, and policies in Turkey from a comparative education perspective, particularly from the viewpoint of Islamic Religious Education. The method employed is library research with a descriptive-analytical approach. Turkey, as a country with a Muslim majority population, has a unique educational system influenced by the dynamics of secularism introduced since the era of Mustafa Kemal Ataturk (1923) and Islamic values that remain strong in society. This article finds that Turkey's educational system encompasses three main pathways: formal education, non-formal education, and higher education supported by the Turkiye Burslari scholarship program. The problems faced include educational quality disparities between urban and rural areas, secular-religious ideological polarization, intense competition for university admission, refugee education challenges, and educational technology gaps. Turkey's educational policies are characterized by efforts to balance modern-secular orientation with Islamic values, including the revitalization of Imam Hatip schools. This study provides significant implications for the development of Islamic education policy in Indonesia.

Keywords: Educational Problems; Islamic Educational Policy; Turkey's Educational System

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak pernah hadir dalam ruang yang steril dari kepentingan politik dan kekuasaan. Ia adalah arena kontestasi di mana nilai-nilai, identitas, dan agenda sosial-politik diperebutkan, dinegosiasikan, dan direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Turki, arena kontestasi ini beroperasi dengan intensitas yang jarang tertandingi oleh negara lain: di sinilah sekularisme negara yang rigid berhadapan langsung dengan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim yang berakar jauh ke dalam sejarah Kesultanan Usmani.

Republik Turki yang diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk mewarisi paradoks yang fundamental: ia berdiri di atas puing-puing imperium Islam terbesar dalam sejarah modern, namun justru menetapkan sekularisme (laiklik) sebagai salah satu pilar konstitusionalnya yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks inilah sistem pendidikan Turki lahir bukan sebagai instrumen netral pengembangan intelektual, melainkan sebagai alat rekayasa sosial yang secara eksplisit bertujuan menciptakan "warga negara Turki modern" yang tercerabut dari identitas keislaman tradisionalnya (Zuhairini, 2019; Zürcher, 2017).

Lebih dari satu abad berselang, arsitektur ideologis sistem pendidikan Turki masih terus bergolak. Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP) sejak tahun 2002 membawa pergeseran dramatis: kurikulum direvisi, jam pelajaran pendidikan agama ditambah, dan yang paling simbolis, Sekolah Imam Hatip yang selama era Kemalis dikerdilkan secara sistematis mengalami ekspansi masif hingga menampung jutaan siswa (Kaya, 2018). Pergeseran ini tidak hanya disambut oleh kelompok konservatif-religius, tetapi juga memicu resistensi keras dari kelompok sekuler yang memandangnya sebagai ancaman terhadap fondasi Republik.

Studi komparatif pendidikan terhadap Turki menjadi sangat relevan bagi Indonesia karena kedua negara berbagi kesamaan struktural yang mendasar: keduanya adalah negara-bangsa dengan penduduk mayoritas Muslim yang berjuang menyeimbangkan antara modernitas, konstitusionalisme, dan aspirasi keagamaan warganya. Jika Indonesia memilih jalan kompromi dengan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, Turki memilih jalan yang lebih konfrontatif dan menghasilkan osilasi kebijakan yang berulang (Nurhasanah & Sassi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana arsitektur sistem pendidikan Turki dikonstruksi secara historis dan institusional? (2) Apa saja problematika struktural yang menghambat perkembangan sistem pendidikan Turki? (3) Bagaimana kebijakan pendidikan Turki khususnya dalam relasi antara sekularisme dan nilai Islam dapat dianalisis secara kritis dan memberikan pelajaran bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia?

Artikel ini berargumen bahwa ketegangan ideologis yang tidak terselesaikan antara sekularisme dan Islam bukan sekadar problem teologis-filosofis, melainkan merupakan hambatan struktural nyata yang memproduksi kebijakan pendidikan yang reaktif, inkonsisten, dan pada akhirnya merugikan kualitas serta keadilan pendidikan bagi seluruh warga negara Turki.

METODE KEGIATAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain kajian pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan historis-kritis dan analisis kebijakan komparatif. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan Turki lebih tepat dikaji melalui analisis mendalam terhadap dokumen, literatur, dan rekam jejak kebijakan ketimbang pengumpulan data lapangan.

Sumber data terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer berupa dokumen kebijakan resmi pemerintah Turki, laporan lembaga internasional (OECD, UNESCO, UNICEF, UNHCR), dan regulasi pendidikan Turki yang tersedia dalam literatur akademik. Kedua, sumber sekunder berupa buku-buku akademik dan artikel jurnal yang telah melalui proses peer review, serta hasil penelitian komparatif terdahulu.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap berurutan: (1) identifikasi dan pengumpulan literatur relevan secara sistematis dengan kriteria inklusi mencakup literatur yang secara spesifik membahas sistem atau kebijakan pendidikan Turki, diterbitkan dalam rentang 2010–2026, dan memiliki relevansi konseptual dengan isu relasi sekularisme dan Islam dalam pendidikan; (2) analisis isi (content analysis) secara kritis terhadap sumber-sumber terpilih dengan memperhatikan konteks historis, kepentingan aktor, dan implikasi kebijakan; serta (3) sintesis dan interpretasi temuan dalam kerangka teoritis Critical Policy Studies (Ozga, 2000; Bowe et al., 1992) yang memandang kebijakan pendidikan sebagai teks yang sarat kontestasi nilai dan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arsitektur Sistem Pendidikan Turki: Konstruksi Historis dan Institusional

a. Fondasi Kemalıs dan Rekayasa Sosial Melalui Pendidikan (1923–2002)

Untuk memahami sistem pendidikan Turki kontemporer, kita harus memulai dari momen founding yang menentukan: proklamasi Republik tahun 1923 dan serangkaian reformasi revolusioner yang mengikutinya. Ataturk dan kaum Kemalıs tidak sekadar mendirikan negara baru; mereka berusaha menciptakan manusia baru, manusia Turki modern yang sepenuhnya beridentitas pada bangsa (milliyetçilik) bukan pada agama. Dalam kerangka ini, dua kebijakan pendidikan awal memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan.

Pertama, Unifikasi Pendidikan (Tevhid-i Tedrisat) tahun 1924 yang menyatukan seluruh lembaga pendidikan termasuk madrasah tradisional di bawah kendali Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini secara efektif menghapus dualisme sistem pendidikan Ottoman dan menutup lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak tunduk pada kurikulum negara (Ramayulis & Nizar, 2011). Kedua, penggantian aksara Arab dengan aksara Latin pada tahun 1928, yang secara simbolis sekaligus praktis memutus generasi baru Turki dari

warisan teks-teks keislaman klasik. Hasilnya adalah sistem pendidikan yang sangat sentralistik, di mana Kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı/MEB) memiliki kendali atas kurikulum, buku teks, dan penunjukan guru—model yang bertahan hingga hari ini (Akyüz, 2013).

b. Reformasi Struktural 4+4+4 dan Implikasi Ideologisnya (2012)

Reformasi pendidikan tahun 2012 yang diinisiasi pemerintahan AKP melalui Undang-Undang No. 6287 merupakan perubahan struktural terbesar sejak reformasi Kemalis. Regulasi ini mengubah struktur pendidikan wajib dari sistem 8 tahun menjadi sistem 12 tahun yang terbagi dalam tiga segmen berurutan masing-masing 4 tahun. Segmen pertama (İlkokul, kelas 1–4) mencakup pendidikan dasar fundamental. Segmen kedua (Ortaokul, kelas 5–8) merupakan sekolah menengah pertama. Segmen ketiga (Lise, kelas 9–12) adalah sekolah menengah atas yang kini bersifat wajib, tersedia dalam berbagai jalur: akademik umum (Anadolu Lisesi), sains (Fen Lisesi), keagamaan (İmam Hatip Lisesi), dan vokasional (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) (Juliani, 2025).

Yang menjadi kontroversi dalam reformasi 4+4+4 bukan sekadar angka tahunnya, melainkan implikasi substantifnya. Dengan memungkinkan siswa berpindah ke jalur pendidikan Imam Hatip setelah menyelesaikan segmen pertama pada usia 10 tahun, pemerintah membuka pintu bagi transfer massal siswa ke sekolah Imam Hatip sejak usia sangat dini. Para kritikus menilai ini sebagai strategi deliberatif untuk mengendalikan komposisi ideologis generasi penerus, sementara pendukungnya berargumen bahwa kebijakan ini hanya memenuhi hak masyarakat Muslim untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai nilai-nilai mereka (Mislaini, 2025).

c. Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Tinggi

Pendidikan non-formal di Turki dikelola melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Sepanjang Hayat (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) yang menyelenggarakan program pendidikan kejar paket, pelatihan vokasional, kursus bahasa, dan program literasi bagi orang dewasa. Jalur ini melayani kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara optimal, terutama di daerah rural Anatolia Timur dan Tenggara (Ibrahim & Nor, 2018).

Pada tingkat pendidikan tinggi, Turki memiliki lebih dari 200 universitas yang diawasi oleh Dewan Pendidikan Tinggi (Yükseköğretim Kurulu/YÖK) yang didirikan pasca-kudeta militer 1981. YÖK beroperasi sebagai regulator tunggal yang sangat sentralistik, mengontrol semua aspek pendidikan tinggi dari kurikulum program studi hingga penunjukan rektor. Turki juga menyediakan beasiswa internasional Türkiye Bursları yang bersifat komprehensif (full scholarship) mencakup biaya kuliah, uang saku, akomodasi, asuransi kesehatan, persiapan

bahasa Turki, serta tiket pesawat pulang-pergi. Beasiswa ini berfungsi strategis sebagai instrumen soft power diplomasi Turki (Nurhasan, 2021).

2. Problematika Struktural Sistem Pendidikan Turki: Analisis Multidimensional

a. Disparitas Geografis dan Kesenjangan Kualitas

Ketimpangan kualitas pendidikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan merupakan problematika paling persisten dalam sistem pendidikan Turki. Data OECD melalui Programme for International Student Assessment (PISA) secara konsisten menunjukkan bahwa siswa dari kawasan urban besar (Istanbul, Ankara, Izmir) mencapai skor yang signifikan lebih tinggi dibandingkan siswa dari kawasan rural Anatolia Timur dan Tenggara (OECD, 2023). Kesenjangan ini terpola sistematis berdasarkan tiga variabel: distribusi guru bermutu yang terkonsentrasi di kota besar, kesenjangan infrastruktur fisik sekolah, dan ketimpangan modal ekonomi-sosial keluarga dalam mendukung pendidikan anak.

Kaya (2018) menemukan bahwa provinsi-provinsi di Turki Tenggara yang sebagian besar dihuni penduduk Kurdi memiliki angka buta huruf dan putus sekolah jauh di atas rata-rata nasional, bukan semata karena kemiskinan, tetapi juga karena resistensi sebagian komunitas terhadap sistem pendidikan negara yang dianggap mengabaikan identitas budaya dan bahasa mereka. Dimensi etnopolitik ini menambahkan kompleksitas tersendiri pada problematika kesenjangan pendidikan di Turki.

b. Polarisasi Ideologis: Sekularisme versus Islam dalam Kurikulum

Polarisasi ideologis merupakan problem yang menyentuh pertanyaan fundamental tentang tujuan pendidikan, identitas nasional, dan relasi antara agama dan negara. Di Turki, polarisasi ini mengambil bentuk oposisi antara kelompok Kemalis-sekuler yang menginginkan kurikulum berbasis sains dan nilai Enlightenment Eropa, dengan kelompok konservatif-religius yang menghendaki pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif (Baihaqi & Abidin, 2023).

Perubahan kurikulum yang dilakukan pada 2017–2019 oleh MEB di bawah kendali AKP mencakup pengurangan materi evolusi Darwin dari buku teks sains, penambahan konten tentang jihad dan martir Muslim dalam pelajaran sejarah, serta perluasan jam mata pelajaran Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Langkah-langkah ini memicu protes keras dari komunitas akademik dan ilmiah Turki yang menilai perubahan tersebut merusak integritas saintifik pendidikan nasional (Habibi, 2018).

c. Tekanan Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Sistem penerimaan mahasiswa baru di Turki didasarkan pada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ujian seleksi nasional yang sangat kompetitif. Dengan jumlah lulusan

sekolah menengah yang terus meningkat sementara kapasitas universitas negeri bergengsi terbatas, tekanan sistem ujian ini menciptakan apa yang oleh para sosiolog pendidikan disebut sebagai *examination society*, masyarakat yang terobsesi pada ujian hingga mengorbankan proses pembelajaran holistik (Gök & Balcı, 2018). Industri bimbingan belajar swasta tumbuh subur dalam ekosistem ini; namun akses ke institusi berkualitas sangat terkait kemampuan ekonomi keluarga, sehingga justru mereproduksi ketimpangan yang ingin diatasi sistem pendidikan formal.

d. Krisis Pendidikan Pengungsi

Konflik Suriah yang pecah pada 2011 menempatkan Turki sebagai negara penerima pengungsi terbesar di dunia, dengan lebih dari 3,6 juta pengungsi terdaftar pada puncaknya di tahun 2019. Dari jumlah tersebut, lebih dari satu juta adalah anak usia sekolah (UNHCR, 2022). Hambatan pendidikan pengungsi beroperasi pada beberapa lapis: hambatan bahasa, trauma psikososial, tekanan ekonomi yang memaksa anak bekerja, dan perbedaan budaya yang mempersulit adaptasi sosial. Meskipun pemerintah Turki mendirikan Temporary Education Centers (TECs) dan kemudian mengintegrasikan anak-anak pengungsi ke sekolah reguler, angka putus sekolah di kalangan pengungsi tetap tinggi dan kualitas integrasinya masih jauh dari optimal (UNICEF, 2021).

e. Kesenjangan Digital dalam Pendidikan

Pandemi COVID-19 mengekspos kesenjangan digital yang sudah lama bersembunyi di balik statistik makro pendidikan. Ketika seluruh pembelajaran dipindahkan ke platform daring melalui sistem EBA (Eğitim Bilişim Ağı), disparitas akses perangkat digital antara keluarga urban-kaya dan rural-miskin menjadi terang benderang. Çakır (2021) menemukan bahwa lebih dari 30% siswa di daerah pedesaan Turki Timur tidak memiliki akses ke perangkat digital yang memadai selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, sehingga berpotensi memperlebar jurang kesenjangan pendidikan secara permanen.

3. Kebijakan Pendidikan Turki: Analisis Kritis

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Antara Retorika dan Realitas

MEB secara resmi mengadopsi kerangka kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Eropa (European Qualifications Framework/EQF) sejak awal 2000-an. Kurikulum ini menekankan delapan kompetensi kunci yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Namun, Gök dan Balcı (2018) mengkritisi kesenjangan besar antara *intended curriculum* dan *implemented curriculum*. Tekanan struktural menuju ujian YKS mendorong guru mengutamakan *drill* soal ujian ketimbang mengembangkan kompetensi

holistik. Akibatnya, kurikulum berbasis kompetensi sebagian besar tetap menjadi dokumen normatif yang indah di atas kertas tanpa transformasi nyata di ruang kelas.

b. Revitalisasi Imam Hatip: Antara Emansipasi Religius dan Instrumentalisasi Politik

Di antara semua kebijakan pendidikan AKP, tidak ada yang lebih kontroversial sekaligus lebih simbolis ketimbang revitalisasi Sekolah Imam Hatip (İmam Hatip Okulları). Didirikan pertama kali pada 1949, Imam Hatip dikembangkan masif pada 1970-an, dihancurkan sistematis pasca-kudeta 1980 dan "postmodern coup" 1997, sebelum dipulihkan dan diperbesar oleh AKP (Ayundasari, 2021). Di bawah AKP, jumlah Imam Hatip meningkat dari sekitar 450 sekolah pada 2002 menjadi lebih dari 1.600 sekolah pada 2018 dengan total lebih dari 1,3 juta siswa (Habibi, 2018).

Bagi pendukungnya, revitalisasi ini merepresentasikan pemulihan keadilan historis bagi komunitas Muslim yang selama puluhan tahun didiskriminasi negara Kemalis. Bagi pengkritiknya, ekspansi ini dikhawatirkan akan menciptakan generasi yang kurang terbekali saintifik, memperkuat segregasi sosial berbasis afiliasi keagamaan, dan menjadi alat AKP untuk memproduksi konstituen yang loyal secara ideologis (Priyadi, 2017). Evaluasi yang jernih menuntut penolakan terhadap kedua simplifikasi ekstrem tersebut: revitalisasi Imam Hatip memenuhi kebutuhan nyata yang sah, namun layak dikritik ketika motifnya lebih berupa konsolidasi kekuasaan daripada peningkatan kualitas pembelajaran.

c. Integrasi Nilai Islam dan Ilmu Pengetahuan

Prinsip integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan modern menjadi salah satu fondasi kebijakan pendidikan Islam di Turki. Fauziah dan Masyithoh (2023) menjelaskan bahwa kebijakan ini menekankan pentingnya menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam sekaligus kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu kontemporer. Aksesibilitas juga menjadi fokus penting: pemerintah berkomitmen memastikan pendidikan Islam dapat diakses semua lapisan masyarakat melalui program beasiswa dan dukungan keuangan (Ibrahim & Nor, 2018). Namun, tantangan implementasi tetap ada terutama dalam menentukan proporsi ideal antara jam pelajaran agama dan ilmu umum tanpa mengorbankan salah satunya.

Kajian terhadap sistem pendidikan Turki menghasilkan beberapa pelajaran konseptual dan praktis yang relevan bagi Indonesia sebagai negara dengan konteks yang serupa namun tidak identik.

Pertama, oposisi biner sekularisme-Islam dalam kebijakan pendidikan terbukti kontraproduktif. Pengalaman Turki menunjukkan bahwa ketika pendidikan menjadi medan pertarungan ideologis antara dua ekstrem yang saling menihilkan, korbannya adalah kualitas pendidikan itu sendiri. Indonesia, dengan model integrasi madrasah ke dalam sistem

pendidikan nasional dan tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu umum di samping ilmu agama, sebenarnya telah menemukan formula kompromi yang lebih organis daripada Turki (Nurhasanah & Sassi, 2024). Formula ini perlu terus diperkuat, bukan digerus oleh polarisasi identitas.

Kedua, sentralisasi kurikulum memiliki trade-off yang serius. Kontrol MEB yang sangat sentralistik atas kurikulum memudahkan implementasi reformasi secara seragam, tetapi juga memudahkan manipulasi kurikulum untuk kepentingan ideologis kelompok yang sedang berkuasa. Indonesia dengan otonomi daerah dan keberagaman konteks lokal perlu menjaga keseimbangan antara standar kurikulum nasional dan fleksibilitas lokal yang memadai.

Ketiga, keberhasilan Türkiye Bursları sebagai instrumen diplomasi pendidikan patut menjadi inspirasi bagi Indonesia. Program beasiswa internasional yang dikembangkan secara strategis dapat meningkatkan soft power sekaligus memperkuat jejaring akademik Islam global (Nurhasan, 2021).

Keempat, krisis pendidikan pengungsi di Turki menawarkan pelajaran tentang pentingnya kesiapan sistem pendidikan nasional untuk merespons krisis kemanusiaan. Di tengah meningkatnya migrasi regional, Indonesia perlu membangun kapasitas sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif bagi anak-anak dari kelompok rentan (UNICEF, 2021).

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Turki adalah konstruksi yang terus bernegosiasi antara warisan Kemalis-sekuler dan aspirasi konservatif-religius, dengan konsekuensi nyata bagi kualitas, keadilan, dan koherensi sistem pendidikan secara keseluruhan. Tiga temuan pokok dapat disarikan sebagai berikut. Pertama, arsitektur sistem pendidikan Turki, yang dibangun di atas fondasi sentralisme Kemalis dan diperbarui berulang oleh berbagai rezim, bersifat sangat responsif terhadap pergeseran kekuasaan politik, membuatnya rentan terhadap instrumentalisasi ideologis. Reformasi 4+4+4 adalah manifestasi paling mutakhir dari pola ini. Kedua, problematika sistem pendidikan Turki bersifat multidimensional: dari ketimpangan geografis dan digital yang berakar pada kesenjangan pembangunan, hingga polarisasi ideologis yang bersifat historis dan struktural. Penanganan salah satu dimensi tanpa memperhatikan dimensi lainnya hanya menghasilkan solusi parsial yang tidak berkelanjutan. Ketiga, kebijakan revitalisasi Imam Hatip mencerminkan upaya negara merespons kebutuhan riil komunitas Muslim yang selama era Kemalis terpinggirkan, sebuah langkah yang memiliki legitimasi demokratis namun layak dikritik ketika didorong lebih oleh kalkulasi politik daripada pertimbangan pedagogis.

REFERENSI

- Akyüz, Y. (2013). *Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 2013'e [Sejarah pendidikan Turki: Dari awal hingga 2013]*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Ayundasari, L. (2021). Perkembangan sekolah Imam Hatip di Turki modern. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 49–64.
- Baihaqi, M. A., & Abidin, M. J. (2023). Kebijakan pendidikan di Turki dan relevansinya terhadap pendidikan modern. *Jurnal Pendidikan Internasional*, 5(2), 30–45.
- Bowe, R., Ball, S. J., & Gold, A. (1992). *Reforming education and changing schools: Case studies in policy sociology*. Routledge.
- Çakır, H. (2021). Digital transformation and educational inequality in Turkey. *Journal of Educational Technology Studies*, 9(3), 95–112.
- Fauziah & Masyithoh. (2023). Integrasi ilmu dan agama dalam kebijakan pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Pendidikan Islam Internasional*, 6(1), 68–82.
- Gök, F., & Balcı, K. (2018). Student selection and placement system in Turkey. *European Education Journal*, 45(2), 50–66.
- Habibi. (2018). *Sistem dan kebijakan pendidikan Turki dalam era globalisasi*. Prenadamedia Group.
- Ibrahim, A., & Nor, F. (2018). *Educational development and equal access in Turkey*. Educational Research Publication.
- Juliani, H. (2025). Sejarah dan sistem pendidikan di Turki. *Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 3(1), 257–278.
- Kaya, A. (2018). *Education in Turkey: Policies and challenges*. Istanbul Bilgi University Press.
- Mislaini. (2025). Sejarah dan sistem pendidikan di Turki. *Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 3(1), 257–278.
- Nata, A. (2012). *Sejarah pendidikan Islam dan perkembangannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhasan, M. (2021). *Sistem pendidikan dan beasiswa di Turki*. Deepublish.
- Nurhasanah & Sassi, K. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam di Turki: Model pendidikan terpadu antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Al-Qayyimah*, 7(2), 112–130.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results: Turkey country note*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/pisa/>
- Ozga, J. (2000). *Policy research in educational settings: Contested terrain*. Open University Press.

- Priyadi. (2017). *Kebijakan pendidikan Islam kontemporer di Turki*. Alfabeta.
- Ramayulis & Nizar, S. (2011). *Filsafat pendidikan Islam: Telaah sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya*. Kalam Mulia.
- UNICEF. (2021). *Education in emergencies: Syria crisis response—Turkey*. UNICEF.
- UNHCR. (2022). *Syria regional refugee response: Turkey*. UNHCR.
- Zuhairini. (2019). *Sejarah pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan di Turki*. Bumi Aksara.
- Zürcher, E. J. (2017). *Turkey: A modern history* (4th ed.). I.B. Tauris.